



KEBIJAKAN NORWEGIA MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DALAM ASPEK EKONOMI DAN SOSIAL

Nurinaya¹, Syafira Maharani Suara², Trisnawati³

Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Nurinaya321@gmail.com

Abstrak

Jurnal ini menjelaskan tentang fenomena Pandemi Covid-19 telah melanda dunia internasional sejak tahun 2019, dampak daripada pandemi ini dihadapi oleh semua negara dunia dalam berbagai aspek termasuk didalamnya ekonomi-sosial. Dunia Internasional dapat dikatakan kewalahan dalam menghadapi Covid-19 karena melumpuhkan aktivitas produksi. Norwegia muncul sebagai salah satu negara dengan peringkat ketahanan terhadap Covid-19 menurut data dari Bloomberg “*The Covid Resilience Ranking*” peringkat 1 dunia. Disamping itu, menurut data OECD Norwegia dapat mempertahankan hasil yang baik pada banyak indikator dalam sektor ekonomi dan sosial, PDB per kapita tetap termasuk yang tertinggi di OECD. Dan diproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan penulisan deskriptif menjelaskan secara rinci terkait kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia untuk menghadapi Pandemi Covid-19 dan memiliki kemajuan yang signifikan disbanding negara lain. Sehingga dapat dijadikan *best practice* dalam menghadapi Covid-19 bagi negara lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan Norwegia dalam aspek ekonomi sosial disebabkan langkah responsive yang dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan *Norwegian government COVID-19 policies dimana pemerintah, sektor swasta dan masyarakat Norwegia* bekerjasama untuk meminimalisir interaksi antar manusia selama pandemic dengan menerapkan kebijakan *travel restrictions* dan *Work From Home (WFH)*. Selanjutnya, Pemerintah Norwegia melakukan penyesuaian untuk kebijakan fiskal dan moneter serta aspek sosial seperti memberikan bantuan dana bagi perusahaan yang terkendala karena Covid-19, dan tetap memberikan gaji bagi para pekerja yang sudah di PHK dan kemudian memaksimalkan akses kesehatan fisik maupun sosial bagi masyarakat Norwegia.

Kata kunci: *Covid-19, Covid Resilience, Norwegia Government, Best-Practice*

PENDAHULUAN

Penyakit Coronavirus (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis (WHO, 2020). Lebih lanjut, Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan dampak sosial menurut *United Nations Departement of Economic and Social Affairs* (UN DESA) Pandemi Covid-19 mempengaruhi semua segmen populasi dan sangat merugikan anggota kelompok sosial tersebut dalam situasi yang paling rentan, terus mempengaruhi populasi, termasuk orang yang hidup dalam situasi kemiskinan, orang tua, penyandang disabilitas, pemuda, dan penduduk asli. Bukti awal menunjukkan bahwa dampak sosial-kesehatan dan ekonomi dari virus ini ditanggung secara tidak proporsional oleh orang miskin. Misalnya, para tunawisma, karena mereka mungkin tidak mendapatkan tempat tinggal yang aman, sangat rentan terhadap bahaya virus. Jika tidak ditangani dengan baik melalui kebijakan, krisis sosial yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga dapat meningkatkan ketimpangan, eksklusivitas, diskriminasi, dan pengangguran global dalam jangka menengah dan panjang (Nation, 2021).

Dunia internasional menghadapi babak baru dengan berbagai keterbatasan dan hambatan selama pandemi Covid 19. Setiap negara diharapkan untuk dapat memberikan paket kebijakan yang responsif ditengah pandemic Covid-19. Norwegia menjadi salah satu negara

yang dapat dikatakan memiliki kebijakan responsif dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pemerintah Norwegia mengambil langkah yang menyeluruh secara masif untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Norwegia, negara Eropa utara yang menempati bagian barat semenanjung Skandinavia. Hampir setengah dari penduduk negara itu tinggal di ujung selatan, di wilayah sekitar Oslo, ibu kota. Sekitar dua pertiga wilayah Norwegia bergunung-gunung dan memiliki sekitar 50.000 pulau (Christensen, 2022). Norwegia memiliki proporsi populasi di atas usia 80 yang lebih tinggi, populasi Norwegia terus tumbuh perlahan tapi pasti. Keadaan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Norwegia karena para lansia memiliki ketahanan tubuh yang cenderung lebih lemah dalam menghadapi Covid-19. Kasus terkonfirmasi Covid-19 pertama kali di Norwegia dilaporkan pada 26 Februari 2020. Virus tersebut terus menyebar, dengan jumlah kasus baru mencapai puncaknya pada akhir Maret. Norwegia menghadapi permasalahan yang signifikan terkait Covid-19 dalam aspek sosial ekonomi, sekitar 80% karyawan Norwegia memiliki situasi kerja yang terpengaruh secara signifikan oleh pandemi Covid-19. 52 % karyawan melaporkan bahwa mereka telah dipekerjakan dari rumah. Lebih dari seperempat telah diberikan tugas kerja lain, 20% jam kerjanya meningkat dan banyak juga yang jam kerjanya dikurangi.

Pusat Penelitian Ekonomi Ragnar Frisch di Oslo melaporkan dalam jangka waktu April-Mei 2020 telah menjatuhkan sektor sosial-ekonomi Norwegia menghantam populasi yang rentan secara finansial termasuk orang tua dengan anak kecil, dan didorong oleh pemberhentian sementara di perusahaan-perusahaan kecil yang kurang produktif dan secara finansial lebih lemah (Christine Aumayr-Pintar, 2020). Norwegia menghadapi babak baru dalam sektor sosial-ekonominya dan

keadaan ini mengharuskan Pemerintah Norwegia untuk dapat mengambil langkah yang efisien menghadapi ketidakstabilan negara akibat Covid-19.

Pada tahun 2022, Norwegia berhasil menanggulangi ketidakstabilan sosial-ekonomi yang dialami akibat Covid-19. Menurut data OECD, Norwegia menjadi negara yang berhasil bertahan menghadapi Covid-19. Norwegia mempertahankan hasil yang baik pada banyak indikator dalam sektor ekonomi dan sosial, PDB per kapita tetap termasuk yang tertinggi di OECD. Pertumbuhan PDB daratan ril sebesar 4,2% diproyeksikan untuk 2021 dan 2022, karena ekonomi pulih ke jalur pra-pandemi. Pada tahun 2023 pertumbuhan *output* akan menjadi 1,7%, sejalan dengan potensi yang dimiliki Norwegia (OECD, 2022). Lebih lanjut, menurut Bloomberg menetapkan Norwegia sebagai negara dengan ketahanan Covid-19 “*The Covid Resilience Rancing*” peringkat 1 dunia (Bloomberg, 2022).

Berlandaskan pada data tersebut, penulis ingin meneliti kebijakan Pemerintah Norwegia dalam menghadapi Pandemi Covid-19 sehingga berhasil dinobatkan sebagai negara peringkat 1 yang bertahan menghadapi Covid-19 dalam sektor sosial-ekonomi.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis berusaha mengeksplorasi dan memahami untuk menjelaskan fenomena internasional yang ada. Penulis melihat respon Pemerintah Norwegia terhadap COVID-19 yang tanggap dan tepat sasaran menjadi langkah yang patut dicontoh dan dapat dijadikan sebagai *best practice* ketika dunia internasional dihadapkan pada isu kesehatan seperti pandemi COVID-19. Norwegia dapat dikatakan berhasil bertahan saat negara lain mengalami ketidakstabilan dalam berbagai sektor terutama sektor sosial-ekonomi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, menurut Sugiyono metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2016). Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian deskriptif bertujuan deskripsi atas sebuah kejadian yang terjadi dan di buat secara sistematis, faktual dan akurat yaitu terkait kebijakan ketahanan dan pemulihan sektor sosial-ekonomi oleh Pemerintah Norwegia yang dinilai cepat tanggap dalam merespon pandemi COVID-19 yang terjadi di negaranya. Lebih lanjut, Norwegia menempati peringkat 1 negara dengan ketahanan COVID-19 menurut Bloomberg dan dengan perbaikan dalam sektor sosial-ekonomi yang signifikan menurut OECD tahun 2022. Penelitian yang dilakukan secara studi kasus akan melakukan pemusatan terhadap objek yang akan di teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

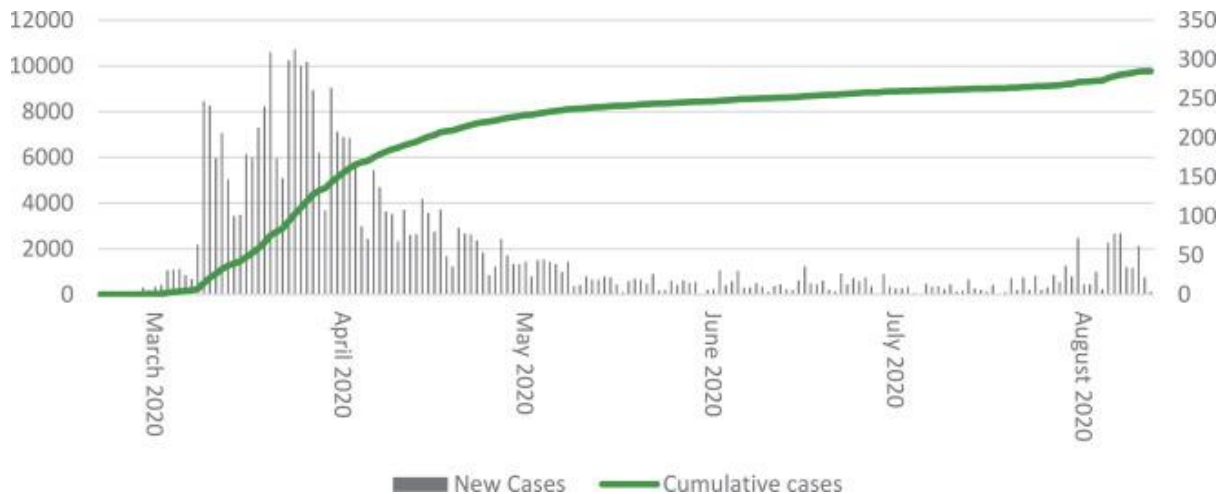
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan menjaga ketahanan negara ditengah pandemic Covid-19. Lebih lanjut, peran Pemerintah sebagai aktor utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik menjadi hal yang krusial karna menyangkut pada kelangsungan kehidupan dari warga negara. Dalam menghadapi pandemic Covid-19, Pemerintah Norwegia dituntut untuk dapat responsif dan mengambil kebijakan tepat sasaran untuk menjamin keberlangsungan negaranya.

Norwegia merupakan salah satu negara yang makmur dengan populasi 5,3 juta dan PDB per kapita €43.900. Ini adalah ekonomi pajak yang tinggi dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi 47,8% dan tarif pajak perusahaan 22% dan beban pajak keseluruhan 38,2% dari pendapatan domestik. Harapan hidup saat lahir adalah yang tertinggi ketiga di Uni Eropa pada 82,7 dengan kesenjangan pendidikan yang kecil, meskipun wanita hidup rata-rata 3,3 tahun lebih lama daripada pria. Orang berusia di atas 65 tahun merupakan 17% dari populasi dengan usia rata-rata 39,5 dan tingkat ketergantungan lansia 26,9 (OECD E. O., 2017) Sebagian besar populasi terkonsentrasi di selatan negara itu dan 83% tinggal di daerah perkotaan tetapi ada populasi tersebar yang signifikan karena kepadatan penduduk secara keseluruhan pada tahun 2016 adalah 14,3 orang per kilometer persegi luas daratan (Bank, Population Density , 2016).

Pandemi Covid-19 telah menjadi fenomena yang harus diperhatikan dan dirumuskan solusinya. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia adalah menyiarkan dan menginformasikan kepada seluruh warga Norwegia bahwa Pandemi Covid-19 telah masuk ke negaranya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan dan menumbuhkan rasa mawas diri kepada warga Norwegia.

Konferensi pers televisi nasional pertama diadakan oleh pemerintah pada 10 Maret 2020 dan berlanjut setiap hari hingga 8 April. Setelah itu, konferensi pers diadakan tiga kali seminggu dan mulai 15 Juni hanya diadakan jika diperlukan tetapi setidaknya seminggu sekali. Perdana Menteri, Menteri Kesehatan dan Kepala NIPH semuanya hadir pada awalnya, sementara kemudian panel termasuk Menteri Pendidikan dan Integrasi dan Menteri Kehakiman dan Keamanan Publik. (Government.no, 2020). Tautan ke konferensi pers, informasi tertulis, dan laporan tersedia melalui situs web pemerintah dengan pembaruan harian. Sementara data tersedia di tingkat regional dan kabupaten, kotamadya telah aktif dalam mengadopsi berbagai strategi komunikasi untuk menjangkau warganya menggunakan konferensi pers harian, surat kabar lokal, radio dan twitter.

Kasus Covid-19 di Norwegia mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2 bulan pertama yaitu bulan April-Mei 2020 dan dilakukan update data setiap minggunya hingga bulan Agustus 2020 .



Grafik 1.1 Grafik Kasus Covid-19 Norwegia Maret-Agustus 2020

I. Road Map Kebijakan Pemerintah Norwegia

Pada 12 Maret 2021, Pemerintah Norwegia mempresentasikan kebijakan baru yang dimaksudkan untuk membatasi dan menunda wabah COVID-19. Peraturan pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Norwegia ialah melakukan pembatasan perjalanan (*travel restrictions*), melarang perkumpulan, dan melakukan penutupan paksa restoran, kedai kopi yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Pelanggaran dapat dihukum dengan denda atau penjara hingga enam bulan.

Lebih lanjut, Pemerintah Norwegia memberikan dua skema kebijakan rekomendasi dan mandat *Norwegian government COVID-19 policies* yang bermuatan hukum untuk membatasi penyebaran Covid-19. Rekomendasi seperti himbauan untuk menjaga kebersihan, tidak berjabat tangan, berpelukan dan menutup mulut saat bersin. Kemudian, merekomendasikan pola kerja *Work From Home*, menghindari penggunaan transportasi umum, membatasi perjalanan domestic hingga menghindari tempat pelayanan kesehatan terutama untuk usia-usia rentan. Selanjutnya untuk mandat yang bermuatan hukum Pemerintah Norwegia menghimbau agar warga Norwegia untuk berdiam diri dirumah, melakukan karantina untuk warga yang telah melakukan perjalanan sebelumnya dan yang pernah melakukan kontak dengan orang yang sudah terkonfirmasi Covid-19. Melakukan *home isolation*, menutup institusi Pendidikan terutama TK dan Paud. Membatalkan semua kegiatan yang mengumpulkan banyak massa seperti kegiatan olahraga, kompetisi hingga acara budaya hingga melakukan pembatasan kegiatan travel internasional *international travel ban* (Government.no, Plan for a gradual reopening, 2021).

II. Kebijakan Fiskal Norwegia

Pemerintah Norwegia dalam upayanya untuk menekan ketidakstabilan fiskal akibat Covid-19. Sebagai langkah preventif Pemerintah Norwegia dengan sigap melakukan penyesuaian kebijakan fiskal dengan menargetkan proyeksi bantuan dana untuk sektor kesehatan dan pangan. Pemerintah Norwegia menggunakan dana darurat untuk melakukan pengadaan pada infrastruktur krusial

yang dibutuhkan pada saat itu seperti mendirikan laboratorium pengujian; mendirikan bangsal khusus untuk meningkatkan kapasitas rawat inap dan perawatan; dan pengadaan fasilitas kesehatan kritis. Terdapat beberapa tahapan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Norwegia untuk menanggulangi dampak dari Covid-19, dengan alokasi dana sebesar US\$ 131,3 Billion atau setara dengan 4,35 persen dari PDB Norwegia dan belum termasuk didalamnya dana obligasi pemerintah dan segala kerugian dari jaminan dan pinjaman pemerintah di atas penyisihan kerugian yang dianggarkan (IMF, Policy Responses to Covid-19, 2020). Pemerintah Norwegia melakukan kategorisasi terkait pengeluaran dan pemasukan dana bagi negara dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Langkah-langkah pengeluaran: (i) skema perlindungan pendapatan rumah tangga yang menawarkan subsidi upah yang lebih besar untuk pemutusan hubungan kerja sementara, tunjangan pengangguran yang lebih besar, dan perluasan penyakit dan perawatan anak; (ii) langkah-langkah untuk bisnis yang menawarkan skema untuk mengkompensasi bisnis yang sangat terpengaruh tetapi sebaliknya berkelanjutan untuk biaya tetap yang tidak dapat dihindari, pemulihan kembali dana pemerintah yang membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Norwegia, hibah untuk *start-up* dan subsidi *rute* penerbangan domestik; (iii) penguatan sektor-sektor penting seperti kesehatan; (iv) subsidi bagi perusahaan untuk menerima kembali pekerja yang diberhentikan sementara, (v) paket transisi hijau, dan terakhir (iv) perluasan dana untuk pendidikan dan pelatihan. Langkah-langkah pengeluaran ini merupakan bidang-bidang yang menjadi fokus pengeluaran dana oleh Pemerintah Norwegia dalam menghadapi Covid-19 (OECD, 2022)
- b) Langkah-langkah pendapatan: (i) penurunan tarif PPN yang dikurangi dari 12 menjadi 6 persen; (ii) penangguhan berbagai pembayaran pajak dan pengurangan pajak pemberi kerja untuk Mei dan Juni 2020, perubahan peraturan CIT sehingga perusahaan yang merugi dapat mengalokasikan kembali kerugian mereka ke laba kena pajak tahun-tahun sebelumnya, dan amandemen sementara pada sistem pajak minyak bumi untuk meningkatkan likuiditas di sektor tersebut; penangguhan biaya penerbangan; penurunan sementara iuran asuransi sosial pengusaha (Pwc, 2022).

Skema penjaminan dan pinjaman untuk bisnis yang mencakup penjaminan pinjaman untuk UKM, dan skema reasuransi dari penyedia asuransi kredit swasta. Anggaran 2021 berlanjut dengan langkah-langkah diskresi yang lebih bertarget untuk mendukung bisnis dan rumah tangga yang konsisten dengan langkah-langkah 2020. Pada tanggal 24 Maret, karena langkah-langkah yang diumumkan lebih ketat dan efek yang diharapkan pada bisnis, Pemerintah membuat ketentuan dalam anggaran nasional yang direvisi, memastikan peningkatan bantuan dana sebesar US\$500 million dalam skema bantuan kota saat ini untuk bisnis yang terkena dampak (Norad, 2020). Pada 11 Mei, Pemerintah Norwegia menerbitkan revisi anggaran 2021 yang berfokus pada peningkatan pemulihan dan inklusi dengan tujuan mengurangi dampak ekonomi jangka panjang dari krisis dan membantu mereka yang masih terkena dampak paling parah.

III. Kebijakan Moneter Norwegia

Kebijakan moneter juga menjadi aspek yang diperhatikan oleh Pemerintah Norwegia. Langkah-langkah moneter utama meliputi: (i) penurunan tingkat kebijakan sebesar 1,5 poin persentase menjadi 0,0 persen; (ii) pemberian tambahan likuiditas kepada bank dalam bentuk pinjaman yang jatuh temponya berbeda; (iii) pembentukan fasilitas swap sebesar US\$ 30 miliar antara Norges Bank dan Federal Reserve AS (pengaturan mata uang bersama); dan (iv) perluasan kemampuan bank untuk meminjam dalam dolar AS terhadap agunan. Sektor keuangan, termasuk gerai penukaran mata uang dan penyedia layanan pembayaran lainnya beroperasi penuh selama proses *lockdown* kedua (28 November-30 Januari). Pertumbuhan kredit ke sektor swasta telah bertahan. Sektor keuangan tetap menguntungkan pada tahun 2020 dan sistem perbankan memasuki guncangan COVID-19 dengan permodalan yang baik dan dengan penyangga likuiditas yang lebih tinggi, yang telah membantu bank mengatasi guncangan dan mencerminkan efektivitas rezim pengawasan sebelum krisis. Kebijakan keuangan makro yang diimplementasikan dan diusulkan meliputi: (i) pelonggaran countercyclical capital buffer sebesar 1,5 poin persentase; (ii) kemungkinan bank untuk sementara melanggar rasio likuiditas (LCR); (iii) pelonggaran sementara peraturan pegadaian, khususnya peningkatan persentase hipotek yang dapat menyimpang dari peraturan; dan (iv) himbauan dari Kementerian Keuangan kepada bank dan perusahaan asuransi untuk tidak membagikan keuntungan (ILO, 2022).

IV. Kebijakan Sosial Norwegia

a) Perlindungan Sosial

Dalam aspek perlindungan sosial Pemerintah Norwegia memastikan untuk dalam segala aspek warga Norwegia mendapatkan perlindungan dalam menghadapi Pandemi Covid-19, kebijakan pertama yang dilakukan adalah memastikan gaji pekerja dalam proses PHK sementara tetap diberikan atas nama tunjangan pengangguran harian. Lebih lanjut, untuk penarikan kontribusi asuransi sosial majikan akan dikurangi 4 poin persentase untuk satu kali masa jabatan, setara dengan dua bulan. Usulan ini akan diajukan dalam APBN Perubahan. Pemerintah mengusulkan amandemen legislatif sementara yang memungkinkan pengusaha untuk memutuskan bahwa karyawan yang diberhentikan sementara dapat melanjutkan sebagai anggota skema pensiun (OECD, First lessons from government evaluations of COVID-19 responses: A synthesis, 21)

b) Retensi Pekerja

Subsidi upah untuk para pekerja PHK sementara melalui tunjangan pengangguran, yang kelayakannya telah dikurangi dari 50 persen menjadi 40 persen pengurangan pekerjaan. Durasi maksimum skema cuti telah ditangguhkan, dan skema telah diperpanjang hingga setidaknya 1 Juli 2021.

c) Bantuan Untuk Bisnis dan Kelangsungan Bisnis

Memperkenalkan skema penjaminan negara untuk pinjaman bank baru kepada UKM yang menderita kerugian karena situasi yang luar biasa. Paket awal NOK 50 miliar akan ditingkatkan jika diperlukan. Mengembalikan Dana Obligasi Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas dan akses ke modal di pasar obligasi Norwegia, di mana perusahaan besar biasanya meningkatkan pendanaan mereka. Dana tersebut akan menyediakan hingga NOK 50 miliar, untuk diinvestasikan dalam obligasi yang diterbitkan oleh

perusahaan Norwegia. Skema kompensasi khusus akan memberikan kompensasi sementara untuk beberapa biaya tetap yang tidak dapat dihindari dari perusahaan yang sangat terpengaruh oleh tindakan pengendalian infeksi. Hibah tambahan untuk perusahaan pertumbuhan muda akan diberikan (NOK 2,5 miliar), untuk memungkinkan pertumbuhan perusahaan, dan pinjaman inovasi meningkat sebesar NOK 1,6 miliar, menjadi NOK 3 miliar. Pemerintah mengusulkan agar jumlah tersebut diarahkan terutama untuk pinjaman likuiditas. Pemerintah juga menyediakan dana dukungan pembayaran bunga (NOK 300 juta), hibah untuk kelompok inovasi swasta (NOK 50 juta), dukungan keuangan untuk R&D (NOK 250 juta) dan dana NOK 1 miliar untuk mencocokkan investasi investor (Goril Ursin, 2022)

d) Akses ke Health Care

Karyawan diberi hak untuk melaporkan sendiri sakitnya selama 16 hari meskipun majikan hanya membayar mulai Hari 4. Wiraswasta dan pekerja lepas juga dapat menerima tunjangan sakit dari Skema Asuransi Nasional mulai hari keempat dan seterusnya untuk ketidakhadiran sakit karena virus corona. Ketidakhadiran sakit selama 16 hari pertama dapat disertifikasi oleh laporan elektronik ke NAV oleh wiraswasta (Nikel, David Nikel).

Berlandas pada kebijakan tersebut, Menurut data OECD, Norwegia menjadi negara yang berhasil bertahan menghadapi Covid-19. Norwegia mempertahankan hasil yang baik pada banyak indikator dalam sektor ekonomi dan sosial, PDB per kapita tetap termasuk yang tertinggi di OECD. Pertumbuhan PDB daratan ril sebesar 4,2% diproyeksikan untuk 2021 dan 2022, karena ekonomi pulih ke jalur pra-pandemi. Pada tahun 2023 pertumbuhan *output* akan menjadi 1,7%, sejalan dengan potensi yang dimiliki Norwegia (OECD, 2022). Lebih lanjut, menurut Bloomberg menetapkan Norwegia sebagai negara dengan ketahanan Covid-19 “*The Covid Resilience Rancing*” peringkat 1 dunia (Bloomberg, 2022).

KESIMPULAN

Pemerintah Norwegia menjadi salah satu negara yang dapat dicontoh terkait penanganan Covid-19. Kebijakan yang diambil sangat responsif dan tepat sasaran terutama dalam aspek ekonomi-sosial. Langkah pertama yang dilakukan ialah melakukan pembatasan aktivitas secara masiv dan terstruktur untuk semua tempat publik yang memiliki resiko penyebaran Covid-19, termasuk larangan penerbangan serta penetapan sanksi. Kemudian, langkah selanjutnya ialah memberikan dukungan keuangan terutama bagi para pekerja yang harus kehilangan pekerjaan (PHK) akibat Covid-19 yaitu tunjangan pengangguran dan meningkatkan kapasitas perawatan kesehatan. Lebih lanjut, Pemerintah Norwegia juga menerapkan skema kompensasi bisnis berkelanjutan bagi bisnis yang mendapatkan dampak besar akibat Covid-19. Untuk kebijakan sosial, pemerintah menjamin legislasi terkait perlindungan hak bekerja dan menerapkan skema pensiun bagi Warga Norwegia yang terkena kebijakan PHK. Memaksimalkan penyediaan fasilitas dan akses kesehatan bagi seluruh Warga Norwegia. Wiraswasta dan pekerja lepas juga dapat menerima tunjangan sakit dari Skema Asuransi Nasional dari Pemerintah Norwegia. Konsistensi dan dukungan pemerintah secara komprehensif berhasil menjaga ketahanan nasional Norwegia dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan

berhasil dinobatkan menjadi negara dengan penanganan serta ketahanan terhadap Covid-19 “*The Covid Resilience Rancing*” unia menurut Bloomberg dan OECD.

Daftar Pustaka

- Bank, W. (2016, May 8). *Population density*. Retrieved from Population density (people per sq. km of land area) - Iceland, Norway, Denmark, Sweden, Faroe Islands:
<https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST?end=2016&locations=IS-NO-DK-SE-FO&start=1996&view=chart>
- Bloomberg. (2022, March 30). *The Best and Worst Places to Be as Covid Travel Curbs Fall Away*. Retrieved from The Covid Resilience Ranking:
<https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/>
- Christensen, J. (2022, April 15). *Countries of the World*. Retrieved from Britannica.com: <https://www.britannica.com/place/Norway>
- Christine Aumayr-Pintar, E. (2020, April 20). *Norway: Working life in the COVID-19 pandemic 2020*. Retrieved from European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions:
<https://euagenda.eu/upload/publications/wpef21026.pdf>
- Goril Ursin, I. S. (2022). The COVID-19 pandemic in Norway: The dominance of social implications in framing the policy response. *Health Policy and Technology*.
- Government.no. (2020, March). *News from Norwegian Ministries about the Coronavirus disease Covid-19*. Retrieved from The coronavirus situation:
<https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/timeline-for-news-from-norwegian-ministries-about-the-coronavirus-disease-covid-19/id2692402/>
- Government.no. (2021). *Plan for a gradual reopening*. Retrieved from www.regjeringen.no:
<https://www.regjeringen.no/en/historical-archive/solbergs-government/andre-dokumenter/koronasituasjonen-2021/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/>
- ILO. (2022). *Country policy responses*. Retrieved from International Labour Organization : <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang--en/index.htm#NO>
- IMF. (2020). *Policy Responses to Covid 19* . Retrieved from International Monetary Fund : <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>
- Nation, U. (2021, Juni 11). *Everyone Included: Social Impact of COVID-19*. Retrieved from UN : Department of Economic and Social Affairs Social Inclusion: <https://www.un.org/development/desa/dspd/everyone-included-covid-19.html>
- Nikel, D. (David Nikel, 24 September). *Norway Reopens: Government Lifts All National Restrictions*. Retrieved from Life in Norway:
<https://www.lifeinnorway.net/norway-lifts-all-national-restrictions/>
- Norad. (2020, November 03). *Norwegian Development Aid in the Age of the Corona*. Retrieved from Norad.no:
<https://www.norad.no/en/front/evaluation/news/2020/evaluation-views--norwegian-development-aid-in-the-age-of-the-corona/>

- OECD. (2022, April 20). *Economic Survey of Norway (February 2022)*. Retrieved from Norway Economic Snapshot: <https://www.oecd.org/economy/norway-economic-snapshot/>
- OECD. (2022). *Norway: boosting productivity and workforce participation while improving housing affordability will help maintain high living standards, says OECD*. Retrieved from oecd.org: <https://www.oecd.org/newsroom/norway-boosting-productivity-and-workforce-participation-while-improving-housing-affordability-will-help-maintain-high-living-standards.htm>
- OECD. (21, Januari). *First lessons from government evaluations of COVID-19 responses: A synthesis*. Retrieved from OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19): <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/first-lessons-from-government-evaluations-of-covid-19-responses-a-synthesis-483507d6/>
- OECD, E. O. (2017). *Greece: Country Health Profile 2017, State of Health in the EU*. Greek: OECD.
- Pwc. (2022). *Creating economic recovery and growth after COVID-19*. Retrieved from Pwc.com: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/government-public-services/six-challenges/economic-recovery-after-covid-19.html>
- Sugiono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- WHO. (2020, December 01). *Coronavirus disease (COVID-19)*. Retrieved from World Health Organization : https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1